

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF POLICY ACCOMPANIMENT FOR DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT OF VILLAGE COMMUNITIES PROGRAMS IN KONAWE SELATAN DISTRICT

Dahlia¹, Bahtiar², Muh. Amir³

- 1) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik PPs UHO; e-mail: dahliamarhandi@gmail.com
- 2) Dosen Tetap Jurusan Sosiologi UHO; e-mail: bahtiar_unhalu@yahoo.co.id
- 3) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail: amir.fisipuh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan pendampingan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe tujuan deskriptif. Informan penelitian diambil secara purposif sebanyak 31 orang dari aparat pelaksana dan kelompok sasaran program. Pengumpulan data menggunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data dan display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pemeriksaan terhadap keabsahan data meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendampingan pelaksanaan kebijakan program belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program sudah berjalan dengan efektif namun pencapaian tujuannya belum optimal.

Kata-kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of the policy accompaniment for development and empowerment of village communities programs in Konawe Selatan District. This study uses qualitative research methods with descriptive objectives. The research informants were taken purposively as many as 31 people from the implementing apparatus and the target group of the program. Data collection uses documents, observation, and conducting interviews. The data analysis technique used in this study is a qualitative technique of interactive models including data reduction, data presentation and data display and conclusion / verification. An examination of the validity of the data includes a test of credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results of the study indicate that the effectiveness of mentoring in the implementation of program policies has not gone well. This can be seen from the planning, implementation, guidance and supervision stages of the program that has been running effectively but the achievement of its objectives has not been optimal.

Key words: Effectiveness, Accompaniment policy, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Era reformasi ini pembangunan desa menjadi skala prioritas dalam rangka percepatan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagai instrument peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Namun, kewenangan yang luas yang diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat perdesaan membutuhkan pendampingan yang optimal karena tanpa pendampingan akan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan komitmen politik bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demikratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut sejalan dengan nawacita ketiga yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”.

Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU Desa dengan pendampingan. Penempatan pendamping desa ini tercermin dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang diadopsi sejak tahun 2014. P3MD adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diharapkan pengelolaan keuangan Desa terlaksana dengan baik dan akuntabel. Hal ini penting karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan

dengan baik sesuai makna karakter dari kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho adalah: “Suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program atau melalui formasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2004).

Desa-desanya di Kabupaten Konawe Selatan yang mendapatkan Dana Desa (DD) setiap tahunnya. Sejumlah Desa di Kabupaten Konawe Selatan merupakan penerima DD tahun 2016 dan 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 06 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017. Sehubungan dengan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan perdesaan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar memerlukan pemerataan pembangunan secara fisik dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kehidupan.

Belum diketahui bagaimana efektivitas pelaksanaan pendampingan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan pengamatan awal, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Konawe Selatan belum optimal. kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan ini dapat dilihat dari posisi keberagaman jenjang pendidikan tenaga pendamping yang merefleksikan kemampuannya dalam memahami permasalahan yang terjadi di desa untuk mencari solusi begitupun dengan tingkat pemahaman di dalam memberikan peningkatan kapasitas kepada aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah masalah sumber daya manusia atau aparat desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa belum dapat melakukan secara maksimal dan kadang tidak tepat pada sasaran terlebih lagi pada skala prioritas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan pendampingan kebijakan program dimaksud.

Istilah efektivitas mengandung kata dasar efektif, berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauhmana suatu organisasi, mewujudkan tujuan-tujuannya (Robbins, 1995; Handayani, 1996). Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Indrawijaya, 2000). Adapun kriteria untuk

mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987) yakni: (1) Pendekatan sumber yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. (2) Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. (3) Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Konsep pelaksanaan dalam studi kebijakan lazim disebut implementasi. Van Meter dan Van Horn (dikutip dalam Winarno, 2012; Wibawa, dkk., 1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Istilah implementasi selalu dilekatkan pada kebijakan, hal ini berarti bahwa yang diimplementasikan adalah kebijakan. Menurut Anderson yang dikutip oleh Wahab (2004) kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi.

Salah satu contoh kebijakan adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. P3MD dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. P3MD dikembangkan oleh pemerintah atas dasar pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih terkoordinasi dengan baik, tidak secara terpisah atau sendiri-sendiri, namun berkelanjutan. Tujuan Umum P3MD adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan.

P3MD diefektifkan melalui pendampingan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa adalah seseorang yang mendampingi desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan Pendamping Desa adalah seseorang yang mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan tenaga ahli adalah seseorang yang mendampingi dan memberikan bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Dalam penelitian ini pendampingan menunjuk pada kegiatan Pendamping Lokal Desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengarahan dan fasilitasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Program DD. Selanjutnya untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan pendampingan digunakan kriteria efektifitas dari Martani dan Lubis (1987) tersebut di atas.

METODE

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memahami betul persoalan Pelaksanaan Kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan yang berjumlah 31 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Model analisis interaktif ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang efektifitas pelaksanaan kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Konawe Selatan dapat diuraikan berdasarkan tiga pendekatan yang digunakan.

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*).

Keberhasilan proses efektifitas pelaksanaan kebijakan P3MD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dalam hal pendampingan guna mencapai sumber yang diinginkan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yaitu: sumber daya manusia,

sumber daya waktu, finansial. Ketiga sumber daya tersebut sangat mempengaruhi proses pendampingan dalam P3MD di Kabupaten Konawe selatan demi mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan dukungan sumber daya maka proses pendampingan dalam P3MD di Kabupaten Konawe Selatan dapat terlaksana dengan baik akan tetapi ketika dalam proses pelaksanaan pendampingan P3MD tidak ada dukungan sumber daya maka proses pendampingan dipastikan tidak terlaksana sesuai yang direncanakan atau disepakati bersama. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Ranomeeto yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses pendampingan P3MD ini memang sangat berpengaruh sekali dengan SDM dalam P3MD itu sendiri berhasil tidaknya itu tergantung dari P3MD untuk memberikan pengetahuan yang baik kita ketahui bahwa para pendamping P3MD itu sudah memiliki kompetensi, pendidikan yang sangat memadai namun apabila tidak ditunjang dengan ilmu kemasyarakatan dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya maka proses pendampingan dilapangan tidak dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan. Jadi sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan P3MD apakah itu di tingkat Desa, Kecamatan Maupun kabupaten”. (Wawancara April 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan P3MD untuk mengawal Dana Desa di Kabupaten Konawe Selatan pengaruh sumber daya manusia ini memang sangat besar sekali ini terlihat dan tergambarkan bagaimana para pendamping desa ini mulai mendampingi masyarakat dan pemerintah desa mulai dari proses perencanaan desa dan perencanaan anggaran desa sehingga menghasilkan suatu dokumen RKP Desa dan Dokumen RPJM Desa dan pada tahap pelaksanaannya bagaimana para pendamping desa ini mengajari dan membimbing masyarakat didalam membuat design dan RAB, pembuatan laporan keuangan yang sederhana. Sumber daya yang penting adalah ketersediaan dana. Pendapat mengenai pengelolaan Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh BPD Mekar Jaya bahwa:

“Persoalan dana ini memang sangat rentan dengan permasalahan apa lagi Dana Desa yang jumlahnya tidak kecil salah mengelola dan tidak transparan akan menimbulkan kerawanan di masyarakat. Sekarang penggunaan Dana Desa rata-rata lebih banyak kearah sarana prasarana atau pembangunan desa sementara bidang pemberdayaan masyarakat desa masih sangat minim. Bagaiman mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalau hanya kegiatan didominasi oleh pekerjaan sarana prasarana yang dinikmati orang-orang tertentu saja sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat masih, seperti pelatihan-pelatihan untuk para petani, untuk ibu-ibu yang ingin kursus menjahit atau pembuatan kue, perbengkelan dan pertukangan ini yang masih kurang di danai padahal dana desa itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”. (Wawancara April 2018)

Berdasarkan pendapat tersebut memang dukungan dana yang cukup dan memadai akan mendukung proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan lancar maka dibutuhkan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dapat mempengaruhi keberhasilan efektivitas pelaksanaan kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Ketiga dimensi indikator ini menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan. Faktor pendekatan sumber daya sebagai salah satu kriteria yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan adalah menguatkan pendapat yang dikemukakan Lubis dan Martani (1987).

2. Pendekatan Proses (*process approach*)

Keberhasilan suatu program pada tahap pelaksanaan pendampingan yang dilakukan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Konawe Selatan sangat tergantung dari proses pelaksanaan kegiatan itu sendiri yang dilakukan oleh pendamping desa. Pendamping Desa dalam P3MD Kabupaten Konawe Selatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan pembangunan desa.

Pendampingan pada P3MD Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan oleh pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari segi proses, pelaksanaan program P3MD telah berjalan dengan baik. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Desa Alebo Jaya terkait proses pendampingan dalam P3MD Kabupaten Konawe Selatan menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Itu tercermin dalam pelaksanaan kegiatan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan yang begitu terarah yang dimulai dari proses perencanaan yang melibatkan semua elemen masyarakat dimana dalam proses perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa, setelah itu kita menuju ke proses penganggaran dimana dalam proses penganggaran ini semua kegiatan yang

akan kita laksanakan berdasarkan usulan yang tertuang dalam dokumen RKP Desa yang nantinya masuk dalam APB Desa dalam dokumen penganggaran dimana didalamnya nantinya akan jelas bagaimana pengelolaan keuangan desa, tata cara pengalokasiannya, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa setelah itu kita masuk dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan pengadaan barang dan jasa dan pelaporan pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/walikota seetiap semester tahun berjalan dan untuk menjaga agar proses pelaksanaan P3MD berjalan dengan baik maka pada tahapan terakhir ini dilakukan pembinaan dan pengawasan. Fungsi Pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan”. (Wawancara Mei 2018).

Berdasarkan pendapat informan tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan pendekatan proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan semua elemen yang ada dalam P3MD diantaranya Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pendamping. Dengan demikian pendekatan proses untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan kegiatan program sangat mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini mendukung pendapat Lubis dan Martani (1987).

3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*)

Pendampingan dalam P3MD Kabupaten Konawe Selatan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika tujuan dan sasaran pendamping desa bisa dapat terwujud dalam pelaksanaan kebijakan. Sasaran merupakan suatu alat untuk mengukur efektifitas suatu organisasi begitupun halnya dengan P3MD yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur berdasarkan standar operasional prosedur.

Melakukan pemberdayaan di dalam lingkup desa berarti ada penyamaan persepsi pembangunan yang sama di antara 336 desa se Kabupaten Konawe Selatan dengan dinamika masyarakat yang bisa saja berbeda antara satu Kecamatan dengan Kecamatan lainnya, bahkan dalam lingkup antar dusunpun dapat berbeda persepsi, mungkin disatu desa posisi matrilinear masih kental terasa atau suara ninik mamak yang harus didengarkan dari pada suara seorang camat sekalipun, ditempat lain mungkin kita dapat berbicara lugas tanpa batasan di sisi lain tutur kata haruslah

dijaga untuk menghormati tuan rumah. Menyamakan seluruh desa di Kabupaten Konawe Selatan bahwa Dana Desa untuk menciptakan inklusifitas tanpa memandang perbedaan kelamin, ras, suku bangsa itu secara teori mungkin terasa mudah, namun sayangnya watak manusia tidak hanya tergambar dengan mudah melalui tingkah lakunya setiap saat.

Mensosialisasikan tentang UU Nomor 6 Tahun 2014 kepada masyarakat desa bukanlah hal yang mudah karena dalam proses sosialisasi ini kita ikut serta membangun kesadaran masyarakat desa untuk membangun desanya sendiri. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa:

“Peran pendamping dilapangan sangat membantu sekali para pemerintah desa dan masyarakat desa dimana para pendamping ini telah memberikan pengetahuannya kepada mereka sehingga ada peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran mereka untuk membangun desa serta memanfaatkan sumber daya yang ada namun di beberapa Kecamatan dan Desa masih ada yang belum optimal dalam proses pendampingannya sehingga di beberapa lokasi wilayah pendampingan para pendamping desa ini masih belum efektif hal ini disebabkan kurangnya tenaga pendamping yang ditempatkan untuk mendampingi wilayah tersebut dan tidak intensnya para pendamping di lokasi tugas serta masih relatif rendahnya kemampuan aparat pemerintahan desa dalam memahami ilmu dan pengetahuan yang disampaikan oleh para pendamping profesional”.
(Wawancara Mei 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa keterlibatan pendamping dalam proses pembangunan di desa maka, pendamping sudah mulai terlibat dari awal proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan desa selama satu tahun menjadi bagian tanggungjawab pendamping. Hal yang lebih penting untuk dilakukan adalah aktif terlibat dan mengikuti arus yang sudah berjalan terlebih dahulu bila ada yang belum sesuai dengan ketentuan tinggal dievaluasi perbaikan kedepannya. Bukan hanya para pendamping itu sendiri melainkan dari pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah harus ikut berperan dalam keterlibatan pendampingan. Berdasarkan pendapat informan tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan P3MD di Kabupaten Konawe Selatan dipengaruhi dari pendekatan sasaran dimana peran pendamping profesional sangat penting dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen. Temuan penelitian ini mendukung teori Lubis dan Martani (1987) tentang efektifitas suatu organisasi.

SIMPULAN

Pendampingan kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Konawe Selatan belum mencapai efektifitas yang optimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas pendampingan dalam P3MD di Kabupaten Konawe Selatan, dua indikator diantaranya yaitu pendekatan sumber dan pendekatan sasaran belum berjalan dengan baik. Ke depan, aparat pelaksana kebijakan (implementer) perlu lebih berfokus pada optimalisasi sumber dan pelibatan kelompok sasaran secara lebih luas.

REFERENSI

- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Handyaningrat, Soewarno, 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Indrawijaya, Adam I., 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Martani, Huseini, dan Lubis, 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Universitas Ilmu-ilmu Sosial.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Robins, S., 1995. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, Solichin A., 2004. *Analisa Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.